

RINGKASAN

Konflik yang bersumber pada sengketa tanah Petilasan Situmpoa melibatkan beberapa kalangan dan kepentingan. Petilasan Situmpoa merupakan bangunan budaya yang keberadaannya penting di masyarakat, namun semakin terancam dengan perkembangan kota Purwokerto. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan proses konflik politik, konsensus politik dan faktor-faktor yang menjadi sumber konflik.

Metode penelitian menggunakan kualitatif studi kasus, dengan pengambilan sampel secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data penelitian diperoleh dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi, menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman serta teknik triangulasi untuk menjamin validitas data.

Hasil penelitian ini yaitu dinamika terjadinya konflik dan konsensus yang ada di Petilasan Situmpoa. Konflik melibatkan antara pengusaha dengan Gempur, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. Konflik terjadi karena adanya gugatan dari pengusaha untuk membongkar Petilasan Situmpoa. Perlawanan dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk Gerakan Masyarakat Panembahan Situmpur (Gempur) dan aksi-aksi penolakan. Pemerintah melalui Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas dalam menangani konflik dan konsensus berperan sebagai mediator. Faktor penyebab terjadinya konflik bersumber dari tiga pihak yaitu pengusaha, Gempur dan pemerintah, yang memiliki kepentingan dalam konflik dan konsensus. Pemerintah Kabupaten Banyumas belum memiliki kebijakan peraturan dalam upaya melindungi benda budaya yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik.

Konsensus yang dihasilkan oleh pengusaha dan Gempur merupakan hasil mediasi Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas. Hasil konsensus berupa pemindahan petilasan dan kompensasi yang diberikan oleh pengusaha kepada Gempur yaitu biaya pemindahan ke lokasi yang baru. Konsensus disepakati oleh pengusaha dan Gempur berupa surat perjanjian. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas diharapkan memiliki kebijakan berupa peraturan daerah dalam upaya melindungi benda budaya. Masyarakat Gempur perlu melakukan inventarisir benda budaya. Pengusaha diharapkan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk mengurangi konflik dalam melaksanakan pembangunan.

Kata Kunci : Budaya, Gempur, Konflik, Konsensus, Pemerintah, Petilasan

SUMMARY

The conflict that come from the source of the land dispute of Cemetery Situmpoa involves some of figures and interests. Cemetery Situmpoa is the culture site that its existence is important for society, but it is started to be menaced with the development of Purwokerto city. The purpose of research is to describe the process of politic conflict, politic consensus and factors that become the conflict source.

Method of research uses case study qualitative, by taking sample is purposive sampling and snowball sampling. Data of research is obtained by observation, interview, and documentation study by using the interactive model analysis of Miles and Huberman and the technique of triangulation to guarantee the data validity.

Result of research, it is the dynamic of the conflict and consensus events at Cemetery Situmpoa. Conflict involves between the entrepreneur and Gempur, and Regional Government of Banyumas. Conflict happens because there is the accusation from the entrepreneur to demolish the Cemetery Situmpoa. The resistance is conducted by society in the form of Public Movement of Panembahan Situmpur (Gempur) and the resistance actions. The government through the Commission D DPRD Regency of Banyumas in handling the conflict and consensus has the role as mediator. The factor that causes the incident of conflict come from three sides that are entrepreneurs, Gempur and government who have the interest in conflict and consensus. The government of the regency of Banyumas does not possess regulation policy in order to protect of cultural sites that is needed by society so it emerges the conflict.

Consensus that has been produced by entrepreneur and Gempur is the result of mediation from Commission D DPRD Regency of Banyumas. The result of consensus is the relocation of cemetery and compensation that are given by entrepreneur for Gempur that is the cost of relocation to the new location. Consensus is agreed by entrepreneur and Gempur with the implementation of agreement letters. Regional government of the Regency of Banyumas is hopefully has the policy such as regional regulation in order to protect the cultural sites. Society of Gempur needs to do the inventory of the cultural sites. The entrepreneurs hopefully can cooperate with the society to reduce the conflict in doing the development.

Keywords: Culture, Gempur, Conflict, Consensus, Government, Cemetery